

**PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMBERIKAN PEMBIAYAAN
MODAL KERJA KEPADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA
KENDARI (Studi Kasus Pada BSI KCP Kendari Lepo-Lepo)**

RAODATUL JANNAH

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BSI KCP Kendari Lepo-Lepo dalam memberikan pembiayaan KUR dalam rangka pengembangan UMKM di Kota Kendari. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan turun langsung kelapangan untuk memahami dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini merupakan para pegawai dan nasabah pada BSI KCP Kendari Lepo-Lepo yang berhubungan langsung dengan Pembiayaan KUR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BSI KCP Kendari Lepo-Lepo berperan menyalurkan pembiayaan PUR Mikro. Perannya dibuktikan dengan Hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian antara tujuan KUR dan hal yang dirasakan oleh nasabah. Selain itu, ketepatan sasaran, sosialisasi KUR serta pemantauan terhadap nasabah telah dilakukan dengan optimal. Namun, dalam menyalurkan pembiayaan KUR, BSI KCP Kendari Lepo-Lepo juga mengalami beberapa kendala yang dihadapi selama memberikan pembiayaan modal kerja yaitu pemahaman masyarakat yang kurang tentang PUR Mikro bank syariah, ketidak-sanggupan calon nasabah memenuhi persyaratan dan ketentuan penggunaan dana PUR, rusaknya nama calon nasabah akibat pembiayaan yang diambil sebelumnya, dan pembatasan dari pemerintah untuk calon nasabah yang sudah pernah mengambil pembiayaan PUR sebelumnya.

Kata Kunci : Peran, BSI, PUR Mikro, UMKM

1. Latar Belakang

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,001% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%.

Bagaimana tidak UMKM punya potensi yang baik dalam menumbuhkan perekonomian Negara? Hal ini disebabkan karena salah satu penyumbang kurangnya angka pengangguran adalah lapangan pekerjaan dalam bentuk UMKM.

Melihat potensi ini juga, maka pemerintah memberikan dukungannya terhadap UMKM dan pelakunya dengan mengesahkan UU. No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Kemudian bermunculannya lembaga-lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, dengan produk kredit usaha rakyat (KUR) turut hadir untuk membantu peningkatan kualitas UMKM.

Pembiayaan dan pendanaan modal usaha dari lembaga keuangan masih sangat diharapkan mampu berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM untuk mendapatkan modal dan dana. Tapi dengan pembiayaan yang terjangkau dan prosedur yang sederhana pastinya, karena penggunaannya adalah pelaku UMKM yang notabene memiliki kondisi ekonomi kelas menengah ke bawah.

Kota Kendari adalah salah kota berkembang di Indonesia. Kendari juga

merupakan ibukota dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai ibukota provinsi, perekonomian tentu berpusat di Kendari.

Kota Kendari, dikutip dari MediaIndonesia.com merupakan kota jasa. Artinya, untuk hidup di Kota Kendari harus dapat selalu menyesuaikan kondisi perekonomian dengan menghidupkan UMKM. Dilansir dari (rri.go.id) Kepala Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Kota Kendari, Alda Kesutan Lapae mengatakan bahwa “pelaku usaha UMKM di Kota Kendari ini sangat pesat peningkatannya dimana dari sebelumnya hanya berjumlah 18.000 di tahun 2019 lalu, kini tercatat sudah mencapai 41.983 pelaku UMKM” tutur Alda Kesutan Lapae. (Idham, , 2023)

Lembaga pembiayaan di Kota Kendari juga cukup banyak dikarenakan ibu kota Provinsi, seperti bank, koperasi dan pegadaian cukup banyak bagi pelaku usaha yang ingin mencari pembiayaan untuk modal usaha. Biasanya, produk jasa untuk pembiayaan atau modal usaha adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karena modal adalah hal terpenting dalam memulai usaha.

Meskipun lembaga pembiayaan dan jasa permodalan cukup memadai di Kota Kendari, terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan pembiayaan atau pendanaan ini menjadi kurang berpengaruh dalam peningkatan UMKM, sebagaimana target dan tujuan awal diadakannya pembiayaan oleh lembaga keuangan.

Melalui observasi awal yang telah dilakukan pada Bazar UMKM yang diselenggarakan oleh KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN Provinsi Sulawesi Tenggara pada Sabtu, 04 Maret 2023 terdapat beberapa UMKM yang belum menyentuh pembiayaan. Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Mirna salah satu pelaku UMKM bahwa ia merasa belum membutuhkan pembiayaan. Hal ini senada dengan data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada 2020 terdapat sekitar 46,6 juta dari total 64 juta UMKM di Indonesia

belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. (Limanseto, 2022) Dikatakan pula pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Imroah, 2019) bahwa peran pembiayaan mikro dalam mengembangkan usaha UMKM kurang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah, hal tersebut dapat terbukti dengan tidak adanya peningkatan pendapatan terhadap beberapa usaha nasabah yang telah melakukan pembiayaan mikro.

Dari pemaparan latar belakang di atas, singkatnya dilihat dari keberadaan sector UMKM di Kota Kendari oleh golongan menengah ke bawah dan permasalahan permodalan yang dihadapi serta potensi UMKM di Kota Kendari dan keberperanan lembaga keuangan dalam membantu UMKM dalam hal ini memberikan, maka peneliti mengangkat judul penelitian “Peran Perbankan Syariah Dalam Memberikan Pembiayaan Modal Kerja Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Kendari (Studi Kasus Pada BSI KCP Lepo-Lepo).”

2. Kajian Teori

Teori Peran

Menurut (Soekanto, 2009) peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Secara etimologi peranan diartikan sebagai suatu yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya suatu atau peristiwa. Sedangkan secara terminology, peranan diartikan sebagai aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. (Soekanto, 2009)

Jadi peranan yang dimaksud di sini adalah suatu institusi yang berusaha memenuhi kewajiban-kewajiban maupun hak-haknya dalam membantu memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada pelaku usaha yang produktif. Institusi yang dimaksud yakni bank syariah serta peran yang dimaksud yakni peran bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

Berbicara tentang pembiayaan artinya berbicara tentang produk dan berbicara tentang peran artinya berbicara tentang efektif atau tidak efektifnya. Maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah terkait efektivitas program.

Efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut. Menurut Kowaas dalam jurnal efektivitas program menyatakan bahwa untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variable-variabel berikut:

- a) Ketepatan Sasaran Program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- b) Sosialisasi Program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.
- c) Tujuan Program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d) Pemantauan Program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. (Kowaas, Pioh, & Kumayas, 2017)

Teori Faktor Penghambat Bank dalam Memberikan Pembiayaan Kepada Nasabah

Pembiayaan merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka tujuan tertentu dan sasaran serta target tertentu. Di dalam prosesnya, pembiayaan memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh

pemohon dalam hal ini nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Namun, dalam prosesnya, bank mengalami beberapa kendala dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurfitriah Ukhty (2019), bahwa secara garis besar faktor penghambat bank dalam memberikan pembiayaan yaitu :

- a) Peminjam kurang cakap dalam pengelolaan usaha yang akan dimodali.

Kemampuan pengelolaan usaha yang dimiliki nasabah menjadi salah satu penentu bank untuk memberikan pembiayaan. Karena melalui pengelolaan usaha yang baik maka akan tercipta keuntungan usaha. Kecakapan pengelolaan usaha dimulai dengan pengelolaan modal yang tepat. Karena, pengelolaan modal yang tepat berpengaruh terhadap profitabilitas (Karina, dkk. 2017)

- b) Manajemen peminjam yang kurang baik dan laporan keuangan yang tidak lengkap.

Kemampuan manajerial juga menjadi patokan bank dalam memberikan pembiayaan. Menurut Erna Puspita dan Kusumaningtyas (2017) di dalam sebuah usaha bahwa kecakapan manajerial dan tingkat pelaporan keuangan yang baik berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap keuntungan usaha. Hal ini yang membuat bank menjadikan tolak ukur manajerial dan laporan keuangan yang baik sebagai syarat memberikan pinjaman modal usaha.

- c) Perencanaan peminjam yang kurang matang.

Perencanaan yang kurang matang menjadi hambatan bank memberikan pembiayaan karena untuk menghindari resiko kerugian penggunaan dan pemberian modal kepada peminjam.

- d) Usaha yang akan dimodali dinilai kurang dalam aspek pemasaran.

Pemasaran menjadi hal yang cukup penting untuk sebuah usaha. Usaha yang kurang dalam aspek pemasaran maka akan menjadi pertimbangan untuk bank memberikan pembiayaan.

- e) Kebijakan pemerintah atau situasi politik yang mempengaruhi usaha.

Kebijakan pemerintah atau situasi politik dapat berpengaruh terhadap modal yang akan diberikan oleh bank kepada pengusaha. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Apabila pemerintah mendukung usaha-usaha masyarakat, maka kebijakan pemerintah akan mengarah kepada kebijakan yang membantu pengusaha, seperti program dan subsidi permodalan.

3. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. sumber data dalam penelitian, dalam hal ini bertindak sebagai data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberi jasa Pembiayaan (Bankir) dan pimpinan Bank

- 2) Pelaku UMKM di Kota Kendari

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data (reduction)
2. Penyajian data (display data)
3. Penarikan kesimpulan (verifcation)

Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan teknik yang dikemukakan oleh (Sugiyono 2014) dengan menggunakan teknik triangulasi.

4. Pembahasan

Peran BSI KCP Kendari Lepo-Lepo dalam Memberikan Pembiayaan Kepada UMKM.

Peran merupakan suatu eksistensi yang mengarah kepada kebermanfaatannya suatu individu atau lembaga terhadap yang lain. Sebagaimana sosiolog, Soerjono Soekanto (2009) menerangkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan peranannya.

Salah satu peran bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, BSI KCP Kendari Lepo-Lepo berperan melalui produknya yaitu pembiayaan PUR yang disalurkan kepada nasabah yang memiliki usaha yang tergolong mikro, kecil dan menengah. Sebagaimana penjelasan dari Ikatan Bankir Indonesia (2014) bahwa pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang diberikan untuk kelangsungan dari usaha mikro kepada nasabah maupun calon nasabah baik usaha perorangan atau badan usaha khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Rahmi, 2022).

Di dalam melakukan menyalurkan pembiayaan PUR Mikro kepada nasabah yang merupakan pelaku usaha, BSI KCP Kendari Lepo-Lepo memiliki empat peran, diantaranya menyalurkan pembiayaan tepat sasaran pembiayaan, melakukan sosialisasi tentang pembiayaan kepada nasabah, memantau penggunaan pembiayaan yang diberikan dan mengupPUR kesesuaian tujuan penggunaan pembiayaan (Kowaas, 2017).

Dari analisis hasil penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat temuan bahwa BSI KCP Kendari Lepo-Lepo berperan dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan modal. Peran-peran BSI KCP Kendari Lepo-Lepo adalah sebagai berikut :

a) Ketepatan Sasaran Pembiayaan

Di dalam menyalurkan pembiayaan, BSI KCP Kendari Lepo-Lepo memiliki sasaran-sasaran tertentu. Sasaran yang dimaksud adalah nasabah yang memiliki usaha dan minimal telah berjalan selama 6 bulan (Wawancara Bapak Sulfahmi Ikhlas, 5 September 2023).

Penjelasan di atas sejalan dengan fakta lapangan yang peneliti temukan, bahwa penerima pembiayaan PUR adalah nasabah dengan usaha tertentu dengan usia usaha sesuai dengan kriteria dari bank :

Analisa Ketepatan Sasaran Program PUR Mikro

Nama Nasabah	Nama Usaha	Jenis Usaha	Usia Usaha
Firdaus	Kos-Kosan	Mikro	2 Tahun
Eri	Bengkel	Mikro	3 Tahun
Titi Sumiati	Warung Makan	Kecil	4 Tahun
Erni	Dagang Sayuran	Kecil	12 Tahun
Sudirman	Kios Sembako	Kecil	5 Tahun
Dudi Riswandi	Bisnis Pestisida	Menengah	10 Tahun

Sumber : Data Olahan Penelitian 2023

Setelah melihat paparan tabel di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan PUR BSI KCP Kendari Lepo-Lepo sudah tepat sasaran. Karena nasabah yang menerima pembiayaan adalah para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usia usaha di atas 6 bulan. Pemasangan kriteria demikian merupakan salah satu upaya selektif pihak bank dalam memberikan pembiayaan, karena terkadang pembiayaan yang diterima oleh nasabah justru digunakan untuk keperluan di luar usaha, sehingga dengan kriteria usaha yang berjalan minimal 6 bulan, pihak bank dapat melihat apakah usaha yang dimiliki nasabah memang memerlukan pembiayaan. Di dalam tujuannya, pembiayaan PUR BSI adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membiayai kebutuhan modal usahanya berdasarkan prinsip syariah. (Karim, 2013)

b) Sosialisasi Pembiayaan

Sosialisasi dapat diartikan sebagai aktivitas membujuk dan mempengaruhi masyarakat untuk kepentingan tertentu. Sosialisasi yang dimaksud adalah sosialisasi pembiayaan PUR BSI KCP Kendari Lepo-Lepo. Sosialisasi tentang perbankan syariah sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kelebihan dan keunggulan produk bank syariah. Sosialisasi bisa dilakukan melalui pelatihan, seminar atau pun sebagainya (Saragih, 2020).

BSI KCP Kendari Lepo-Lepo dalam melakukan sosialisasi pembiayaan PUR menggunakan beberapa cara, yaitu :

1. GESERBRO (Gerakan Sebar Brosur)
2. Prospek nasabah
3. Promosi melalui social media
4. Mengisi event-event yang melibatkan pelaku UMKM

Gerakan sebar brosur (GESERBRO) oleh pihak BSI KCP Kendari Lepo-Lepo dilakukan tiap pekan di pasar, toko-toko, event-event yang melibatkan UMKM, serta melalui social media. Gerakan sebar brosur merupakan strategi sosialisasi yang paling dominan dilakukan oleh pihak BSI KCP Kendari Lepo-Lepo. Menurut Mustafa, brosur adalah salah satu bentuk media promosi biasanya berupa kertas cetakan yang mengandung informasi tentang sesuatu barang atau jasa yang dibeli atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelanggan (2012, h.33). Penggunaan brosur untuk mensosialisasikan tentang pembiayaan PUR Syariah memang tergolong masih efektif.

Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Erlita Khristina Dewi & Suryani Sere Pardosi (2022) tentang efektivitas periklanan melalui brosur bahwa brosur memiliki dimensi persuasive yang tinggi, mampu menarik empati pembaca, komunikatif dan memiliki pengaruh yang besar.

Sedangkan sosialisasi dengan cara lainnya seperti prospek nasabah dan

mengisi event-event tertentu bersifat kondisional berdasarkan kesempatan yang ada.

Hal ini selaras dengan pendapat nasabah BSI PUR yang merupakan narasumber bahwa informasi tentang BSI dan pembiayaannya mereka dapatkan dari pihak bank secara langsung, rekomendasi dari teman dan keluarga, serta ada juga dari media social.

c) Pemantauan Penggunaan Pembiayaan

Pemantauan penggunaan pembiayaan merupakan salah satu peran BSI KCP Kendari Lepo-Lepo dalam rangka pengawasan terhadap pelaku usaha atau nasabah yang diberi pembiayaan. Pemantauan dilakukan sebagai bentuk monitoring penggunaan kesesuaian dana dengan peruntukannya diajukan. Biasanya monitoring dilakukan 1 bulan pasca pencairan, kemudian 6 bulan terakhir dan 1 tahun setelah pencairan (Wawancara Ibu Fitriatin Ni'mah, 4 Oktober 2023).

Hal ini selaras dengan pendapat dari nasabah yang mendapat pemantauan dari pihak bank. Ada yang mendapatkan pemantauan di bulan pertama saja seperti Bapak Sudirman, Ibu Erni dan Bapak Eri, ada yang mendapatkan pemantauan rutin hingga penggunaan modal selesai seperti Bapak Firdaus, dan ada yang hanya mendapatkan pemantauan sekali di awal seperti Bapak Dudi Riswandi. Pemantauan dilakukan tidak rutin dan merata kepada nasabah, hal ini disebabkan karena pemantauan sifatnya kondisional dan berpotensi menimbulkan ketersinggungan nasabah jika dipantau terus menerus, kemudian pemantauan rutin juga hanya ditujukan pada nasabah yang pembayaran angsurannya sudah macet.

Pemantauan penggunaan pembiayaan juga merupakan salah satu bentuk manajemen resiko yang diterapkan oleh bank. Manajemen

resiko bank syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 adalah serangkaian methodology dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, menguPUR, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank (Hasan, 2022).

Tentu pemantauan dilakukan dalam rangka mengurangi dan manajemen resiko yang terjadi antara pemberi dana (bank) dan pengelola dana (nasabah).

d) Tujuan Program

BSI KCP Kendari Lepo-Lepo menyediakan program pembiayaan PUR untuk membantu para pelaku usaha di Kota Kendari yang membutuhkan modal usaha. Tujuan dari pembiayaan PUR BSI KCP Kendari Lepo-Lepo adalah untuk penyediaan modal usaha kepada nasabah untuk mengembangkan usaha.

Hal ini sejalan dengan pendapat Kasmir (2013) yang menjelaskan bahwa pembiayaan dari bank bertujuan membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan pembiayaan tersebut maka nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Peneliti menganalisa bahwa pembiayaan PUR BSI KCP Kendari Lepo-Lepo ini telah mencapai tujuannya dimana penyaluran pembiayaan telah sesuai dengan kegunaannya.

Hal ini dapat dilihat dari keperluan para nasabah BSI KCP Kendari Lepo-Lepo yang menggunakan pembiayaan yang diberikan untuk modal pengembangan usaha mereka :

1. Pengembangan tempat usaha
2. Penyediaan barang jualan yang lebih banyak
3. Menutupi biaya distribusi barang jualan

Dari uraian di atas, penggunaan modal dari pembiayaan yang diberikan

oleh bank digunakan sebagaimana mestinya (untuk kepentingan usaha). Seperti pengembangan tempat usaha yang dilakukan oleh Bapak Firdaus, Ibu Titi Sumiati dan Bapak Sudirman, dan penyediaan stok barang dagangan oleh seluruh nasabah. Sedangkan Bapak Dudi Riswandi menggunakan pembiayaan PUR untuk menutupi pembiayaan distribusi barang jualannya.

Kendala BSI KCP Kendari Lepo-Lepo dalam Menyalurkan Pembiayaan Kepada UMKM

Dari analisis peneliti berdasarkan hasil penelitian, di dalam melaksanakan perannya sebagai penyalur pembiayaan, BSI KCP Kendari Lepo-Lepo juga memiliki beberapa kendala, diantaranya:

1. Pemahaman masyarakat yang kurang tentang PUR bank syariah.
2. Ketidak-sanggupan calon nasabah memenuhi persyaratan dan ketentuan penggunaan dana PUR .
3. Rusaknya nama calon nasabah akibat pembiayaan yang diambil sebelumnya.

Uraian di atas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeni yang dikutip oleh Nurfitriah Ukhty (2019) yang menjelaskan bahwa hambatan atau kendala yang dapat menyebabkan suatu pembiayaan bermasalah secara garis besar disebabkan oleh factor peminjam yang PUR ang cakap dalam pengelolaan usaha yang akan dimodali, PUR ang massifnya sosialisasi yang dilakukan pihak bank, perencanaan peminjam yang PUR ang tepat, dan kebijakan pemerintah atau situasi politik yang mempengaruhi usaha.

Berdasarkan teori di atas, peneliti menganalisis data hasil penelitian tentang kendala BSI KCP Kendari Lepo-Lepo diantaranya :

a) Pemahaman Masyarakat yang PUR ang Tentang PUR Bank Syariah

Bank syariah merupakan salah satu lembaga penghimpun dan penyalur

dana masyarakat yang bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Secara historis, bank syariah di Indonesia terkhusus di Kota Kendari tergolong masih baru kehadirannya setelah bank-bank konvensional ada, sehingga belum terkenal luas sebagaimana bank konvensional.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala yang dihadapi oleh BSI KCP Kendari Lepo-Lepo adalah PUR angnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah dan produk pembiayaannya, sehingga kadang stereotip muncul di masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Hal ini menandakan bahwa sosialisasi tentang bank syariah dan pembiayaan PUR -nya belum massif dan menyeluruh (Ukhty, 2019).

Padahal sosialisasi agar masyarakat paham dengan produk bank syariah secara simultan dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk beralih dari bank konvensional yang ribawi ke bank syariah yang syar'i (Imran & Bambang Hendrawan, 2017).

b) Ketidak-Sanggupan Calon Nasabah Memenuhi Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Dana PUR

Di dalam menyalurkan pembiayaan kepada para nasabahnya, BSI KCP Kendari Lepo-Lepo cukup selektif. Terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk menerima pembiayaan PUR ini. Persyaratannya mulai dari usaha calon nasabah yang harus minimal sudah berjalan selama 6 bulan hingga ketentuan penggunaan modal yang diberikan harus sesuai perjanjian dan peruntukannya. Pemasangan syarat dan ketentuan yang cukup ketat dilakukan oleh pihak bank tentunya merupakan salah satu bentuk manajemen resiko yang akan terjadi kedepannya, sehingga bank berusaha

untuk mengurangi resiko kerugian akibat persyaratan dan ketentuan tidak dipenuhi oleh calon nasabah.

Jika dianalisis lebih mendalam, kendala BSI KCP Kendari Lepo-Lepo dalam menyalurkan PUR ini merupakan kendala yang berasal dari internal diri dan usaha nasabah yang tidak cakap dalam mengelola usahanya kemudian mencoba mengajukan pembiayaan (Ukhty, 2019).

Karena berdasarkan penuturan pihak bank, terkadang calon nasabah berusaha mengajukan pembiayaan PUR untuk digunakan pada tujuan lain yang sifatnya konsumtif. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan PUR diberikan yaitu untuk membantu memodali usaha nasabah yang sifatnya produktif.

c) Rusaknya Nama Calon Nasabah Karena Pembiayaan yang Diambil Sebelumnya

Kendala berikut yang dihadapi oleh pihak BSI KCP Kendari Lepo-Lepo adalah rusaknya nama calon nasabah yang akan mengambil PUR disebabkan pada saat mengambil pembiayaan sebelumnya, calon nasabah tersebut mengalami kemacetan dalam membayar angsurannya. Pihak BSI KCP Kendari Lepo-Lepo sangat selektif dalam memberikan pembiayaan PUR kepada nasabah. Sedangkan bagi calon nasabahnya, bisa disebabkan oleh banyak factor, salah satunya adalah perencanaan calon nasabah PUR yang PUR ang tepat (Ukhty, 2019).

Jejak nama calon nasabah yang terekam rusak juga merupakan salah satu bentuk ketidak-siapan calon nasabah dalam mengelola modal yang diberikan sebelumnya. Apabila calon nasabah memiliki jejak rekam yang PUR ang baik sebelumnya dalam mengelola pembiayaan yang di dapatkan, maka ditakutkan jika diberikan pembiayaan kembali maka berpotensi melakukan kembali hal yang

sama, yang kemudian hari menjadi resiko yang harus ditanggung.

5. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. BSI KCP Kendari Lepo-Lepo sebagai salah satu bank penyalur KUR telah menjalankan perannya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian antara tujuan KUR dan hal yang dirasakan oleh nasabah. Selain itu, ketepatan sasaran, sosialisasi KUR serta pemantauan terhadap nasabah telah dilakukan dengan optimal. Tercapainya peran BSI tersebut tentunya memberikan kesejahteraan kepada keluarga para pelaku UMKM pada khususnya dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat pada umumnya.
2. Di dalam menjalankan perannya sebagai KUR, BSI KCP Kendari Lepo-Lepo mengalami beberapa kendala dalam memberikan pembiayaan modal kerja kepada UMKM. adapun kendala yang dihadapi oleh BSI KCP Kendari Lepo-Lepo selama memberikan pembiayaan modal kerja yaitu pemahaman masyarakat yang kurang tentang PUR bank syariah, ketidak-sanggupan calon nasabah memenuhi persyaratan dan ketentuan penggunaan dana PUR, rusaknya nama calon nasabah akibat pembiayaan yang diambil sebelumnya, dan pembatasan dari pemerintah untuk calon nasabah yang sudah pernah mengambil pembiayaan PUR sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Agustin, Hamdin; Armis & Hasrizal Hasan. (2022). *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 551-564
- Dewi, A. (2013). *Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus*

Bank BRI). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(3), 105-116.

Elsandra, Y., & Yulianto, A. A. (2013). *Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Berbasis Industri Kreatif Melalui ICT*. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 35.

Faqih, L. A., Muslimah, H. A.-Z., & Wijoyo, S. H. (2019, April). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Individu dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Wilayah Kerja Malang*. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, III(4), 3668-3676.

Fuad, M., & Trianna, M. (2018). *Analisa Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM*. *j-EBIS*, 220-221.

Gede, I. A., Wayan, N. S., & Nyoman, I. G. (2022, September). *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara*. *Nusantara Hasana Journal*, 2, 13-17.

Hutapea, R. (2020, Oktober). *Minimalisasi Risiko Kredit (NPL) Pada Fintach Peer to Peer Lending melalui Kewajiban Pelaporan SLIK OJK*. *Jurnal Ilmiah Madala Education*, 6, 241-253.

Idham. (2023, Juni 16). . Retrieved from [rri.co.id](https://www.rri.co.id): <https://www.rri.go.id/kendari/daerah/263439/disperdagkop-dan-ukm-kota-kendari-dorong-tumbuhnya-pelaku-umkm>

Imran & Bambang Hendrawan, (2017) *Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah*. *Jurnal of Business Administration*, 209-218.

Indonesia, I. B. (2014). *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kasmir. (2013). *Dasar-dasar Perbankan*.

- Jakarta: Rajawali Pers.
- Kowaas, A. S., Pioh, N., & Kumayas, N. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Tomohon Internasional Flower Festivas Di Kota Tomohon. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 4.
- Maryati, S. (2014). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan Di Sumatera Barat. *Ekonomica*, 1-17.
- Nainggolan, E. U. (2021, Maret 13). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from Artikel DJKN: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- OJK. (n.d.). Retrieved November 25, 2022, from <http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>
- Pato, S. (2013). Analisis Pemberian Kredit Mikro pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 875-885.
- Puspita, E., & Kusumaningtyas, D. (2017). Pengaruh Mekanisme Kepemilikan Manajerial, Kecakapan Manajerial, Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Intervening. *Efektor* 4(2), 31-35. <https://doi.org/10.29407/e.v4i2.968>
- Putri Subagio, Karina Mentari, dan Moch D. Ar. " Analisis Pengelolaan Modal Kerja dalam Upaya Meningkatkan Likuiditas dan Profitabilitas (Studi pada PT. Gudang Garam Tbk Periode 2014-2016) ." *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, Vol. 51, no.1, 6 Okt. 2017, pp. 15-24.
- Raco, J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, dan Keunggulannya. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahmi, Novia. 2022. Analisi Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Pada Pt. Bank Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Rumah.com, T. E. (2022, Mei). Retrieved November Jumat, 2022, from Rumah.Com: <https://www.rumah.com/panduan-properti/slik-ojk-65439::~:~:text=Funksi%20SLIK%20JK%20adalah%20untuk,penyedia%20kredit%20untuk%20mempertahankan%20kredibilitasnya>
- Samsu. (2017). Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Reseach & Development. Jambi: Pusaka Jambi.
- Saputra, L. D., & Wahyudono, H. (2023, April 9). Antara Sultra. Retrieved from Sultra. <https://sultra.antaranews.com/amp/berita/442443/diseperdagkop-sebut-jumlah-umkm-di-kendari-meningkat-usai-pandemi>
- Saraswati, R. A. (2012). Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit terhadap Afektivitas Pemberian Kredit pada BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung. *Jurnal Nominal*, 1.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (22nd ed.). Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarna, A., & Suparman, A. (2019, Desember). Peranan Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Pada Pt. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Pembantu JalancagaK. 1(2), 119-135.
- Sumiyadi. (2019). Partisipasi Perempuan Rumah Tangga Nelayan dalam Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Wilayah Pesisir Teluk Kendari . *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4-5.
- Sumiyanto, A. (2008). BMT Menuju Koperasi Modern. Yogyakarta: ISES Pub.

- Turmudi, M. (2017). Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 23-24.
- Wibowo, E., Widodo, & Widodo, U. H. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah?* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yasman, R., & Afriyeni. (2019). Prosedur Pemberian Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jorong Kampung Tengah (JKT) Pariman Cabang Padang. 1-9.
- Yuliani, W. (2018, Mei). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta*, II, 83-91.
- Zulkifli, Z. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

